



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Oktober 2020

Halaman: 9

Angka Kemiskinan Masih Jadi PR

■ Pemkot Butuh Terobosan OPD untuk Sejahterakan Masyarakat

SELESAIKAN MASALAH

- Ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan masih menyisakan sejumlah persoalan di Kota Yogyakarta.
- OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta diminta melahirkan lebih banyak inovasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Angka gini ratio yang kini mencapai 0,423 menjadi peringatan karena masih terdapat sekat lebar antara si kaya dan si miskin di Kota Yogyakarta.
- Inovasi yang melibatkan lintas OPD pun sangat dibutuhkan, karena hal tersebut juga sangat berkaitan dengan angka kemiskinan.
- Inovasi untuk OPD ini seiring dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta (Perwal) Nomor 77 Tahun 2020.
- Penyelamatan masalah butuh deretan terobosan, yang tidak berserangan dengan aturan.
- Salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif di sisi selatan Kota Yogyakarta jadi salah satu contoh langkah percepatan tersebut.
- Pengembangan itu diyakini mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan industri kreatif sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

YOGYA, TRIBUN - Ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan masih menyisakan sejumlah persoalan di Kota Yogyakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta dituntut melahirkan lebih banyak inovasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, tingginya angka gini ratio yang kini mencapai 0,423 menjadi peringatan karena masih terdapat sekat lebar antara si kaya dan si miskin di Kota Yogyakarta. Inovasi yang melibatkan lintas OPD pun sangat dibutuhkan, karena hal tersebut juga sangat berkaitan dengan angka kemiskinan.

"Permasalahan kota sekarang ini menyangkut ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan. *Gini ratio* masih cukup tinggi dan angka kemiskinan ada potensi bertambah seiring pandemi Covid-19," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (8/10).

Inovasi untuk OPD ini seiring dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta (Per-

Permasalahan kota sekarang ini menyangkut ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Yogyakarta

1.
2.
3.

• ke halaman 15

☐ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui

Angka Kemiskinan Masih

● Sambungan Hal 9

wal) Nomor 77 Tahun 2020. Heroe menandakan, untuk menyelesaikan beragam persoalan di kota pelajar saat ini, dibutuhkan deretan terobosan, yang tidak berseberangan dengan aturan. Utamanya, mengenai problem kemiskinan yang hingga kini belum selesai sepenuhnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan, pihaknya berharap

inovasi-inovasi yang muncul dari OPD tidak hanya bersifat sektoral semata. Namun, alangkah baiknya dapat menyelesaikan masalah besar.

"Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi. Kota Yogyakarta saat ini kan kondisinya minus dua persen. Nah, bagaimana inovasi itu kedepannya bisa menumbuhkan angkanya, agar sesuai dengan janji kita di RPJMD," terangnya.

"Memang, seluruh OPD kita dorong untuk berinovasi. Tapi, inovasi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah, tidak asal inovasi ya. Untuk itu, OPD harus tahu, apa

saja permasalahan di Kota Yogyakarta, bukan sekadar permasalahan di OPD saja," tambah Agus.

Ia mengakui, polemik tersebut hanya bisa diselesaikan jika ada sinergi yang bagus antar OPD. Termasuk juga soal angka kemiskinan yang sekarang masih berada di angka 13 persen dan harus segera diatasi. Menurutnya, OPD harus bergerak dan melahirkan inovasi yang saling berkaitan.

"Makanya, perlu didorong agar OPD-OPD di proses bisnis itu bisa mengeroyok permasalahan ini, agar kemiskinan kita bisa di angka yang optimis," cetus Kepala

Bappeda.

Agus pun menyebut, rencana pengembangan ekonomi kreatif di sisi selatan Kota Yogyakarta jadi salah satu contoh langkah percepatan tersebut. Menurutnya, pengembangan itu diyakini mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan industri kecil, sekaligus memangkas angka kemiskinan.

"Jadi, Kota Yogyakarta sekarang ini kan baru menggalakan ekonomi kreatif ya, contohnya *co working space* untuk para pelaku ekonomi kreatif di Pasar Prawirota-man dan di titik lain yang sedang disiapkan," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005